



Organisasi
Perburuhan
Internasional

Ringkasan Proyek

Nama Proyek:	Program Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua (PIPE): Mengurangi Kemiskinan dan Mewujudkan Perdamaian dan Pembangunan di Papua dan Papua Barat
Tujuan:	Proyek ini bertujuan memberikan kontribusi bagi keseluruhan pembangunan masyarakat adat dengan membantu mereka mencapai kemampuan dan swasembada yang lebih besar dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesetaraan gender dan menguatkan mekanisme perdamaian dan pembangunan di desa-desa dan komunitas-komunitas mereka.
Mitra Utama:	♦ Organisasi Masyarakat ♦ Unit Pemerintah Daerah ♦ Organisasi Non-Pemerintah
Jangka waktu:	3 tahun (2005 – 2008)
Cakupan Geografis:	Kecamatan Muara Tami dan Kemtuk Gresi di Kotamadya/Kabupaten Jayapura, Papua, dan Kecamatan Tanah Rubuh dan Kebar di Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
Acuan Program untuk Indonesia:	Pelaksanaan secara efektif program-program padat lapangan kerja dan mata pencaharian lainnya untuk daerah-daerah yang terkena krisis, khususnya Aceh, Sumatera Utara dan Indonesia Timur
Donor:	Dana Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Keamanan Manusia (United Nations Trust Fund for Human Security/UNTFHS) dengan dukungan dari Pemerintah Jepang
Anggaran:	USD 1,538,000
Hubungi:	Domingo Nayahangan Kepala Penasihat Teknis domingojkt@ilo.org



Kemiskinan di Indonesia

Proporsi penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan resmi telah menurun dari 60% menjadi 11% antara tahun 1970 dan 1996 (Bank Dunia, 2002). Akan tetapi, sebagian besar penduduk yang terisolasi di bagian timur Indonesia masih menghadapi tingkat kemiskinan yang meluas secara tidak proporsional. Ini terutama dijumpai di Provinsi Papua dan Papua Barat, di mana hingga 74% penduduknya tinggal di daerah terisolir dengan sedikit akses untuk mendapatkan fasilitas ekonomi dan pelayanan guna memenuhi kebutuhan mereka yang paling mendasar (Kajian terhadap Kebutuhan Papua, 2005).

Uraian Proyek

Proyek ini merupakan bentuk dukungan awal ILO bagi keseluruhan upaya untuk mengurangi kemiskinan dan menopang mekanisme perdamaian dan pembangunan yang ada di Papua, dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (Otsus). Secara keseluruhan, proyek ini mencerminkan prioritas pembangunan pemerintah pusat sebagaimana diindikasikan dalam “Program Nasional Pekerjaan yang Layak untuk Indonesia”, yang menyoroti penciptaan lapangan kerja sebagai langkah utama dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah.

Tujuan Proyek

Secara spesifik, proyek ini berupaya meningkatkan kemampuan masyarakat adat dan instansi pemerintah daerah untuk:

- ❖ Mengurangi kemiskinan melalui upaya penciptaan



penghasilan dan lapangan kerja yang berkelanjutan;

- ❖ Mewujudkan kesetaraan gender dengan meningkatkan pengakuan hak dan peran perempuan dan anak perempuan dalam proses pembangunan; dan
- ❖ Memperkokoh mekanisme perdamaian dan pembangunan melalui dialog yang membangun dan kebijakan serta program yang bersifat mendukung.

Hasil-hasil yang diharapkan di antaranya:

- ❖ Diperolehnya hasil analisis kondisi biologi dan fisik, sosial ekonomi dan budaya, termasuk analisis terhadap persoalan-persoalan gender, perdamaian dan pembangunan di lokasi-lokasi yang terpilih sebagai proyek percontohan, yang akan menjadi dasar bagi para pihak terkait dalam

menentukan bantuan yang sesuai bagi pengurangan kemiskinan dan pembangunan pedesaan di daerah-daerah tersebut;

- ❖ Meningkatnya peluang untuk mendapatkan penghasilan dan lapangan kerja bagi penduduk miskin di lokasi proyek percontohan dengan bertumpu pada usaha-usaha masyarakat yang berkelanjutan dan perbaikan penyampaian pelayanan dasar;
- ❖ Tingkat kesadaran yang lebih tinggi dan pengakuan yang lebih besar terhadap hak-hak perempuan dan laki-laki serta meningkatnya keterlibatan perempuan dan anak perempuan dalam penciptaan penghasilan dan lapangan kerja dan dalam proses pembangunan masyarakat; dan
- ❖ Mekanisme yang lebih kuat dan efektif bagi perdamaian



dan pembangunan di daerah tersebut yang ditopang melalui dialog dan kebijakan serta program yang bersifat mendukung.

Strategi Proyek

Sebagai strategi inti, proyek terpusat pada inisiatif masyarakat adat, pengetahuan tradisional, lembaga dan sumber daya bagi pengurangan kemiskinan, untuk

menopang perdamaian dan meningkatkan pembangunan di tingkat pedesaan. Pengalaman, praktik terbaik dan pelajaran yang dihasilkan selama pelaksanaan proyek didokumentasikan agar dapat direplikasi dan digunakan sebagai masukan untuk perbaikan kebijakan dan program yang relevan.

Dalam menjalankan strategi ini, proyek menggunakan pendekatan pembangunan partisipatif berbasis komunitas (*community-driven participatory development/CDPD*) di mana komunitas mitra secara sistematis diberi kesempatan untuk secara proaktif mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan dan mengupayakan terwujudnya aspirasi pembangunan mereka. Terinspirasi oleh kerangka Pekerjaan yang Layak ILO dan Konvensi ILO No. 169 tentang

Masyarakat Adat di negara-negara independen, metodologi CDPD memberikan nilai penting yang setara terhadap proses dan hasil di setiap proyek.

Pelaksanaan Proyek

Proyek ini dirancang untuk melewati enam tahap, yaitu: 1) pembentukan kerangka kelembagaan; 2) survei terhadap masyarakat; 3) penyiapan rencana aksi masyarakat untuk pengurangan kemiskinan dan pembangunan pedesaan; 4) pelaksanaan rencana aksi masyarakat; 5) evaluasi proyek; dan, 6) pengaitan pengalaman masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan program. Tiap tahap mengarah ke tahap berikutnya mengikuti alur yang logis.

Pada awal tahun 2008, proyek telah berkembang ke tahap pelaksanaan rencana aksi masyarakat. Dalam tahap ini, proyek menjalankan peran fasilitator menyeluruh dari proses pembangunan partisipatif berbasis komunitas. Kegiatan-kegiatan pengurangan kemiskinan berbasis komunitas berfungsi sebagai titik awal bagi pelaksanaan rencana aksi masyarakat. Berdasarkan sumber mata pencaharian yang ada, yang dianggap sebagai prioritas utama, dilakukan serangkaian kegiatan pelatihan keterampilan dasar praktis yang dapat secara langsung diterapkan dan bersifat spesifik untuk tiap-tiap lokasi. Disediakan materi, peralatan dan perlengkapan yang bersifat spesifik, tergantung pada kebutuhan. Materi, peralatan dan perlengkapan ini kemudian diserahkan untuk dipelihara dan digunakan para organisasi masyarakat mitra sebagai bagian dari mekanisme untuk memastikan keberlanjutan pelatihan keterampilan yang diberikan.

Dua hal terpenting lainnya yaitu perwujudan kesetaraan gender dan penguatan mekanisme perdamaian dan pembangunan yang ada di tingkat pedesaan, diintegrasikan ke dalam proses pengembangan mata pencaharian.

Pencapaian-pencapaian hingga saat ini

- ❖ Lebih dari 2.000 anggota masyarakat mitra di empat lokasi percontohan mengambil bagian dalam pelatihan peningkatan keterampilan yang berkaitan dengan mata pencaharian yang bersifat spesifik ini dan sekarang sedang menerapkan keterampilan mereka untuk memperbesar produksi yang pada akhirnya meningkatkan penghasilan dan kesempatan mereka untuk menjadi pekerja mandiri. Di samping itu, melalui organisasi-organisasi masyarakat berbasis budaya setempat, mereka membentuk mekanisme pendukung mata pencaharian seperti fasilitas-fasilitas bersama dan dana pinjaman bergulir guna memastikan keberlanjutan mata pencaharian mereka.
- ❖ Kendati hidup di tengah lingkungan sosial budaya yang sangat patriarkis, jumlah kaum perempuan yang berpartisipasi dalam proses pengembangan keterampilan semakin besar, khususnya dalam hal penciptaan penghasilan dan lapangan kerja, dan semakin banyak kaum laki-laki yang memberikan pengakuan pada peran penting perempuan dalam urusan keluarga maupun masyarakat. Kelompok-kelompok yang keseluruhannya beranggotakan perempuan sudah mulai muncul dalam



kegiatan-kegiatan ekonomi seperti produksi sayur-mayur, pengolahan buah dan kewirausahaan mikro. Perubahan bahkan tidak mustahil segera terjadi dalam struktur kepemimpinan desa yang biasanya dikuasai laki-laki, karena sejumlah perempuan telah diberi kesempatan untuk menjadi fasilitator pembangunan masyarakat dan duduk dalam kepengurusan kepanitiaan.

- ❖ Mekanisme perdamaian berakar budaya dan pembangunan sedang diperkuat oleh kegiatan proyek yang memberikan kesempatan bagi tokoh masyarakat untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dalam mengupayakan terwujudnya kepentingan bersama. Yang terpenting dari kesempatan ini adalah penguatan struktur kepemimpinan di desa-desa untuk mewujudkan kepemimpinan dan pengambilan keputusan secara kolektif di tingkat kabupaten. Ketika proses ini berkembang, diharapkan konflik yang timbul akibat kurang atau tidak adanya komunikasi dan penyebab-penyebab serupa

dapat diminimalkan dan diselesaikan dengan lebih efisien dan efektif.

Dampak Proyek

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sejauh ini telah membawa sejumlah dampak positif di lokasi-lokasi proyek. **Di tingkat masyarakat**, dampak yang paling signifikan adalah meningkatnya pemahaman bahwa, ketimbang hanya menjadi penonton dan penerima manfaat dari program-program pembangunan yang direncanakan dan dikelola secara eksternal — yang umumnya tidak berkelanjutan — masyarakat adat dapat, melalui lembaga-lembaga yang ada, memprakarsai dan mengelola proses pengembangan mereka sendiri melalui kemitraan dengan pemerintah dan penyedia layanan lainnya. Hasilnya, banyak anggota masyarakat mitra, baik perempuan maupun laki-laki, telah atau sedang menciptakan penghasilan dan kesempatan yang lebih besar untuk bekerja mandiri, dan berada pada jalur untuk keluar dari kemiskinan.

Di tingkat pemerintah, dampak kegiatan proyek terlihat melalui

semakin meningkatnya kemauan lembaga mitra di pemerintah untuk mendukung inisiatif-inisiatif pembangunan partisipatif yang digerakkan masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan penciptaan penghasilan dan lapangan kerja. Ini terlihat dari munculnya kesempatan yang lebih besar bagi digunakannya pendekatan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam pelaksanaan program seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK).



Kantor ILO Jakarta
Menara Thamrin Lantai 22
Jl. M.H. Thamrin Kav 3
Jakarta 10250
INDONESIA
Telp. 62 21 391 3112
Faks. 62 21 310 0766
Email: jakarta@ilo.org
Website: www.ilo.org/jakarta